

Ilmu Kepolisian dalam Perspektif European Police College

Eko Rudi Sudarto

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK)

E-mail: ekosudarto@stik-ptik.ac.id

Informasi Artikel:

Diterima:	Revisi:	Disetujui:	Diterbitkan:
1 April 2026	13 Mei 2026	11 Juni 2026	31 Juli 2026

Abstrak : *Ilmu kepolisian (police science) berkembang seiring meningkatnya kompleksitas tugas kepolisian dalam masyarakat modern. Di Eropa, pengembangannya memperoleh momentum melalui inisiatif European Police College (CEPOL) yang mendorong pendekatan ilmiah terpadu terhadap kepolisian. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep ilmu kepolisian dalam perspektif CEPOL berdasarkan laporan Perspectives of Police Science in Europe. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif terhadap dokumen resmi CEPOL. Hasil kajian menunjukkan bahwa ilmu kepolisian dipahami sebagai disiplin terapan yang bersifat interdisipliner, mengintegrasikan hukum, kriminologi, sosiologi, psikologi, dan manajemen untuk meningkatkan profesionalisme kepolisian. CEPOL menekankan keterkaitan antara penelitian, pendidikan, dan praktik operasional, serta pentingnya nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan rule of law sebagai fondasi penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam menghadapi tantangan keamanan kontemporer. Dalam konteks isu-isu global, seperti kejahatan transnasional, terorisme, migrasi ilegal, kejahatan siber, dan ancaman hibrida, pendekatan ilmu kepolisian yang berbasis pengetahuan menjadi semakin relevan untuk memperkuat kapasitas adaptif institusi kepolisian. Bagi Indonesia, perspektif CEPOL memberikan referensi konseptual dalam pengembangan ilmu kepolisian yang mampu menjawab dinamika keamanan*



nasional, termasuk penanganan kejahatan lintas negara, transformasi digital kepolisian, serta penguatan tata kelola keamanan yang demokratis dan akuntabel.

Kata kunci : *Ilmu kepolisian, CEPOL, pemolisian, pendidikan kepolisian, negara hukum.*

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern membawa konsekuensi meningkatnya kompleksitas fungsi kepolisian dalam kehidupan bernegara. Kepolisian tidak lagi dipahami semata-mata sebagai institusi penegak hukum yang menjalankan fungsi represif, tetapi sebagai organisasi publik yang memiliki tanggung jawab luas dalam menjaga keamanan, ketertiban, perlindungan hak asasi manusia, serta pengelolaan konflik sosial dalam masyarakat demokratis.¹ Perubahan peran tersebut menuntut adanya pendekatan ilmiah yang mampu menjelaskan secara sistematis bagaimana kepolisian bekerja, bagaimana kebijakan keamanan dirumuskan, serta bagaimana praktik pemolisian dapat ditingkatkan melalui penelitian dan pendidikan yang berbasis pengetahuan. Dalam konteks inilah ilmu kepolisian (*police science*) berkembang sebagai bidang kajian yang berupaya mengintegrasikan teori dan praktik dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Dalam literatur akademik, kajian tentang kepolisian pada awalnya berkembang dalam berbagai disiplin ilmu secara terpisah. Ilmu hukum mempelajari kepolisian dalam kaitannya dengan penegakan hukum dan kewenangan negara, kriminologi meneliti kejahatan dan respon terhadap kejahatan, sosiologi mengkaji hubungan antara polisi dan masyarakat, sementara ilmu administrasi dan manajemen menyoroti organisasi kepolisian sebagai institusi birokrasi. Fragmentasi tersebut menyebabkan tidak adanya satu disiplin yang secara khusus mempelajari kepolisian sebagai objek kajian yang utuh. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mengembangkan suatu bidang ilmu yang secara khusus mempelajari kepolisian secara komprehensif, baik sebagai institusi maupun sebagai proses sosial.²

¹ David H. Bayley, *Police for The Future*, (Oxford: Oxford University Press, 1994), 125-126

² European Police College (CEPOL), “Perspectives of Police Science in Europe: Final Report,” (2007), 10

Kebutuhan akan pendekatan ilmiah terhadap kepolisian semakin kuat seiring dengan meningkatnya tuntutan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan fungsi keamanan. Dalam masyarakat demokratis, polisi tidak hanya dituntut efektif dalam menegakkan hukum, tetapi juga harus mampu bekerja sesuai dengan prinsip *rule of law*, menghormati hak asasi manusia, dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik.³ Kondisi tersebut menuntut adanya dasar keilmuan yang kuat sebagai landasan bagi pendidikan, pelatihan, dan pengambilan kebijakan di bidang kepolisian. Oleh karena itu, pengembangan ilmu kepolisian tidak dapat dipisahkan dari upaya modernisasi institusi kepolisian itu sendiri.⁴

Dalam konteks internasional, khususnya di Eropa, kebutuhan akan pengembangan ilmu kepolisian semakin mendesak seiring dengan meningkatnya kerja sama lintas negara dalam bidang keamanan. Integrasi Uni Eropa membawa konsekuensi meningkatnya mobilitas manusia, barang, dan jasa, yang pada saat yang sama membuka peluang bagi berkembangnya kejahatan lintas negara, seperti perdagangan manusia, terorisme, kejahatan siber, dan kejahatan terorganisasi. Tantangan tersebut tidak dapat dihadapi oleh satu negara secara sendiri-sendiri, melainkan memerlukan kerja sama yang erat di antara negara-negara anggota. Kerja sama tersebut tidak hanya memerlukan koordinasi operasional, tetapi juga kesamaan pemahaman tentang fungsi kepolisian, standar profesional, serta pendekatan ilmiah dalam menangani masalah keamanan.⁵

Dalam rangka mendukung kebutuhan tersebut, Dewan Uni Eropa membentuk European Police College (CEPOL) sebagai lembaga yang bertugas meningkatkan kerja sama pendidikan dan pelatihan bagi pejabat kepolisian tingkat tinggi di negara-negara anggota. Mandat CEPOL tidak hanya terbatas pada pelatihan, tetapi juga mencakup pengembangan pendekatan Eropa terhadap isu-isu utama dalam pemberantasan kejahatan, pencegahan kriminalitas, serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan publik, terutama yang memiliki dimensi lintas negara.⁶ Dalam melaksanakan mandat tersebut, CEPOL

³ Hermawan Sulistyio & Tito Karnavian, *Democratic Policing*, (Jakarta: Pensil 324, 2018).

⁴ European Police College (CEPOL), 9

⁵ European Police College (CEPOL), 3-4

⁶ European Police College (CEPOL), 5

menyadari bahwa diperlukan dasar konseptual yang jelas tentang ilmu kepolisian agar pendidikan dan penelitian dapat dikembangkan secara terarah.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan pendekatan Eropa terhadap kepolisian adalah belum adanya kesepahaman tentang definisi dan ruang lingkup ilmu kepolisian.⁷ Kajian tentang kepolisian telah banyak dilakukan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu, tetapi hasil penelitian tersebut belum terintegrasi dalam suatu kerangka ilmiah yang dapat digunakan secara bersama. Selain itu, setiap negara memiliki tradisi kepolisian yang berbeda, baik dalam sistem hukum, struktur organisasi, maupun budaya institusional, sehingga sulit merumuskan konsep police science yang berlaku secara umum. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana mungkin mengembangkan pendekatan Eropa terhadap kepolisian apabila tidak ada kesamaan pemahaman tentang ilmu kepolisian itu sendiri.

Untuk menjawab persoalan tersebut, CEPOL membentuk kelompok kerja yang terdiri dari akademisi dan praktisi kepolisian dari berbagai negara Eropa dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda. Kelompok ini bertugas mengkaji kemungkinan pengembangan ilmu kepolisian sebagai disiplin ilmiah yang dapat menjadi dasar bagi pendidikan dan penelitian kepolisian di Eropa. Dalam kajian tersebut disepakati bahwa ilmu kepolisian harus dipahami sebagai bidang interdisipliner yang mempelajari kepolisian sebagai institusi sekaligus pemolisian sebagai proses sosial. Dengan demikian, ilmu kepolisian tidak hanya berkaitan dengan hukum dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial, politik, psikologis, dan organisasi yang mempengaruhi praktik kepolisian.⁸

Pendekatan interdisipliner terhadap ilmu kepolisian sejalan dengan perkembangan studi kepolisian dalam literatur internasional. Greene menyatakan bahwa studi kepolisian modern tidak dapat dipahami hanya melalui satu disiplin ilmu, karena praktik pemolisian merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan publik, budaya organisasi, struktur kekuasaan, serta hubungan antara polisi dan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan ilmu kepolisian memerlukan

⁷ European Police College (CEPOL), 20

⁸ Sebastian Roché, "Police Science: Science of The Police or Science for The Police? — Conceptual Clarification and Taxonomy for Comparing Police Systems," (2017)

integrasi antara penelitian akademik, pengalaman praktis, dan kebijakan publik, sehingga pengetahuan yang dihasilkan dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan legitimasi kepolisian.⁹

Greene juga menekankan bahwa perkembangan studi kepolisian pada akhir abad ke-20 menunjukkan pergeseran dari pendekatan normatif menuju pendekatan empiris yang berbasis penelitian. Jika pada masa sebelumnya kajian tentang kepolisian lebih banyak berfokus pada aturan hukum dan struktur organisasi, maka dalam perkembangan modern perhatian beralih pada bagaimana polisi benar-benar bekerja dalam praktik, bagaimana kebijakan diterapkan, serta bagaimana masyarakat merespons tindakan kepolisian.¹⁰ Pergeseran ini mendorong lahirnya konsep *knowledge-based policing*, yaitu pemolisian yang didasarkan pada bukti ilmiah dan hasil penelitian, bukan hanya pada tradisi atau pengalaman semata.

Dalam konteks inilah CEPOL menempatkan pengembangan ilmu kepolisian sebagai bagian penting dari upaya membangun kepolisian modern di Eropa. Ilmu kepolisian dipandang sebagai jembatan antara teori dan praktik, antara penelitian dan kebijakan, serta antara pendidikan dan operasional. Dengan adanya dasar ilmiah yang kuat, diharapkan kepolisian dapat meningkatkan profesionalisme, memperkuat akuntabilitas, dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan keamanan yang semakin kompleks.

Selain itu, pendekatan Eropa terhadap ilmu kepolisian menekankan bahwa fungsi kepolisian harus dijalankan dalam kerangka negara hukum dan masyarakat demokratis. Polisi harus bertindak berdasarkan hukum, menghormati hak asasi manusia, serta berada di bawah pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, pendidikan kepolisian harus mencakup pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, etika profesi, serta tanggung jawab sosial. Ilmu kepolisian tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga

⁹ Jack R. Greene, "The Upside and Downside of the 'Police Science' Epistemic Community," *Policing*, Volume 8, Number 4, (2014), 379–392

¹⁰ Jack R. Greene, "The Upside and Downside of the 'Police Science' Epistemic Community," 381

memastikan bahwa kekuasaan kepolisian digunakan secara sah dan proporsional.¹¹

Perkembangan konsep ilmu kepolisian di Eropa juga menunjukkan bahwa kepolisian tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan politik di mana ia beroperasi. Polisi bukan hanya pelaksana hukum, tetapi juga bagian dari sistem pemerintahan dan masyarakat. Oleh karena itu, studi tentang kepolisian harus mencakup analisis tentang hubungan antara negara, masyarakat, dan kekuasaan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan dalam literatur studi kepolisian modern yang menempatkan kepolisian sebagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, dan budaya.¹²

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ilmu kepolisian dalam perspektif CEPOL dengan menelaah konsep *police science* yang dikembangkan dalam laporan *Perspectives of Police Science in Europe* dan dokumen konseptual terkait, serta membandingkannya dengan perkembangan studi kepolisian dalam literatur akademik internasional. Penggunaan data laporan CEPOL didasarkan pada pembacaan penulis terhadap kerangka pemikiran CEPOL yang menawarkan pendekatan ilmu kepolisian dalam kerangka *knowledge-based policing* yang mengintegrasikan penelitian, pendidikan, dan praktik operasional dengan menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, dan *rule of law*. Perspektif ini relevan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu kepolisian dan transformasi kelembagaan kepolisian di Indonesia agar lebih profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika keamanan global. Atas dasar itu, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih sistematis tentang ruang lingkup, karakter, dan tujuan ilmu kepolisian, serta relevansinya bagi pengembangan pendidikan dan penelitian kepolisian, khususnya dalam konteks negara yang sedang memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas institusi kepolisian.

¹¹ Sebastian Roché, "Police Science: Science of The Police or Science for The Police? — Conceptual Clarification and Taxonomy for Comparing Police Systems," (2017)

¹² Jack R. Greene, "The Upside and Downside of the 'Police Science' Epistemic Community," 380

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sumber utama penelitian adalah laporan resmi CEPOL berjudul *Perspectives of Police Science in Europe* yang disusun oleh *Project Group on a European Approach to Police Science*. Dokumen ini dipilih karena merupakan rujukan utama dalam pengembangan konsep ilmu kepolisian di Eropa. Analisis dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama terkait definisi ilmu kepolisian, hubungan antara penelitian dan praktik kepolisian, serta peran pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan profesionalisme polisi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara sistematis perspektif CEPOL mengenai ilmu kepolisian sebagai disiplin ilmiah. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk menafsirkan gagasan-gagasan yang terdapat dalam laporan CEPOL, khususnya terkait dengan interdisiplinaritas, integrasi teori dan praktik, serta nilai-nilai demokrasi dan *rule of law* dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.

TINJAUAN LITERATUR ILMU KEPOLISIAN

Kajian mengenai ilmu kepolisian (*police science*) berkembang pesat, khususnya sejak berakhirnya Perang Dunia ke-2.¹³ Perkembangan ini mencapai puncaknya seiring dengan transformasi sosial-politik di Eropa yang menuntut profesionalisme kepolisian,¹⁴ yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari hukum, kriminologi, sosiologi, hingga ilmu administrasi publik. Berbeda dengan cabang ilmu yang memiliki batasan objek yang jelas, ilmu kepolisian sejak awal berkembang secara interdisipliner karena berkaitan dengan fungsi negara dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam literatur akademik, istilah *police science* sering digunakan dengan pengertian yang berbeda-beda, tergantung pada tradisi keilmuan dan konteks negara yang mengembangkannya.

¹³ David H. Bayley, *Police for the future*. (Oxford: Oxford University Press, 1994), 3-4.

¹⁴ Robert Reiner, *The politics of the police* (4th ed.) (Oxford: Oxford University Press, 2010), 2-5.

Secara historis, istilah *police science* dapat ditelusuri hingga abad ke-18 di Eropa, terutama di Prancis dan Jerman, ketika konsep *Polizeiwissenschaft* digunakan untuk merujuk pada ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan masyarakat.¹⁵ Pada masa tersebut, istilah “polisi” tidak hanya berarti aparat penegak hukum, tetapi mencakup seluruh fungsi negara dalam menjaga kesejahteraan, ketertiban, dan keamanan publik.¹⁶ Oleh karena itu, *police science* pada masa awal merupakan bagian dari ilmu administrasi negara yang berfokus pada bagaimana pemerintah mengatur kehidupan masyarakat secara efektif.¹⁷

Sebaliknya, tradisi Anglo-American (terutama berkembang di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia) lebih banyak menggunakan istilah *Police Studies* atau *Policing Studies* daripada *Police Science*. Fokus utamanya bukan membangun suatu disiplin ilmu kepolisian yang mandiri, melainkan menganalisis berbagai aspek kepolisian melalui perspektif kriminologi, sosiologi, hukum pidana, dan kebijakan publik. Kajian Anglo-American umumnya berorientasi pada isu-isu praktis seperti efektivitas patroli, investigasi kriminal, penggunaan diskresi polisi, hubungan polisi-masyarakat, akuntabilitas, dan strategi pengendalian kejahatan.¹⁸ Bahkan dalam laporan CEPOL tahun 2007 disebutkan bahwa pendekatan Eropa terhadap *Police Science* dianggap lebih ambisius dibandingkan tradisi Anglo-Saxon karena berupaya membangun kerangka konseptual dan identitas keilmuan tersendiri bagi kepolisian, sedangkan tradisi Anglo-American lebih menempatkan studi kepolisian sebagai bagian dari rumpun ilmu sosial dan kriminologi yang lebih luas.

Terlepas dari perbedaan antara tradisi Eropa yang dibawa CEPOL dengan tradisi Anglo-American, dalam perkembangan berikutnya, terutama setelah munculnya negara modern dan sistem hukum yang lebih terstruktur, pengertian kepolisian mengalami penyempitan. Polisi dipahami sebagai lembaga

¹⁵ Giuseppe Campesi, *A Genealogy of Public Security: The Theory and History of Modern Police Powers*, (New York, NY: Routledge, 2016), 23-24

¹⁶ Michael Foucault, *Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France, 1977–1978*. (New York: Palgrave Macmillan, 2007); lihat juga Thomas Feltes, “Polizeiwissenschaft in Deutschland,” in *Polizei & Wissenschaft Heft*, 4, 2007, 2-21

¹⁷ Giuseppe Campesi, *A Genealogy of Public Security*, 45-47.

¹⁸ Lihat lebih jauh pada ulasan Peter K. Manning, “The Study of Policing,” *Police Quarterly* 8 (2005): 23–43, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:143917875>.

khusus yang bertugas menegakkan hukum dan menjaga ketertiban, sehingga kajian tentang kepolisian mulai dipisahkan dari ilmu pemerintahan secara umum.¹⁹ Namun demikian, kajian tentang kepolisian tidak berkembang sebagai disiplin yang berdiri sendiri, melainkan tersebar dalam berbagai bidang ilmu. Ilmu hukum mempelajari kewenangan kepolisian, kriminologi meneliti kejahatan dan pencegahannya, sosiologi mengkaji hubungan antara polisi dan masyarakat, sedangkan ilmu organisasi dan manajemen mempelajari struktur dan kinerja institusi kepolisian.²⁰

Dalam literatur modern, perkembangan studi kepolisian semakin dipengaruhi oleh meningkatnya tuntutan profesionalisme dan akuntabilitas institusi kepolisian. Greene menyatakan bahwa pada paruh kedua abad ke-20, studi kepolisian mulai berkembang sebagai bidang penelitian tersendiri yang tidak lagi terbatas pada kajian normatif, tetapi juga mencakup penelitian empiris tentang bagaimana polisi bekerja dalam praktik. Perkembangan ini didorong oleh kebutuhan untuk memahami efektivitas kebijakan kepolisian, hubungan antara polisi dan masyarakat, serta dampak sosial dari tindakan kepolisian.²¹

Menurut Greene, salah satu ciri utama dari studi kepolisian modern adalah pergeseran dari pendekatan legalistik menuju pendekatan sosial dan organisasi. Jika sebelumnya penelitian lebih berfokus pada aturan hukum yang mengatur kewenangan polisi, maka dalam perkembangan modern perhatian beralih pada bagaimana organisasi kepolisian berfungsi, bagaimana keputusan diambil, serta bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan. Pendekatan ini menempatkan kepolisian sebagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh faktor budaya, politik, dan ekonomi, sehingga tidak dapat dipahami hanya melalui perspektif hukum.²²

¹⁹ Giuseppe Campesi, *A Genealogy of Public Security: The Theory and History of Modern Police Powers* (London: Routledge, 2017), 47-48

²⁰ Egon Bittner, *The Functions of the Police in Modern Society*, (Rockville, MD: National Institute of Mental Health, 1970)

²¹ Jack R. Greene, "The Upside and Downside of the 'Police Science' Epistemic Community," *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 8(4), 379-392. <https://doi.org/10.1093/police/pau034>

²² Jack R. Greene, "The Upside and Downside of the 'Police Science' Epistemic Community," 382.

Perkembangan tersebut mendorong munculnya gagasan tentang *knowledge-based policing*, yaitu pemolisian yang didasarkan pada penelitian ilmiah dan bukti empiris.²³ Dalam pendekatan ini, kebijakan, keputusan, dan praktik kepolisian harus didukung oleh bukti serta dianalisis secara kritis, bukan ditentukan secara sembarangan atau tanpa pertimbangan.²⁴ Konsep ini kemudian menjadi salah satu dasar bagi pengembangan ilmu kepolisian sebagai disiplin terapan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan legitimasi kepolisian dalam masyarakat demokratis.

Dalam konteks Eropa, upaya untuk merumuskan ilmu kepolisian secara sistematis memperoleh momentum melalui inisiatif European Police College (CEPOL). CEPOL memandang bahwa perkembangan kerja sama keamanan di Uni Eropa menuntut adanya kesamaan pemahaman tentang fungsi kepolisian, standar profesional, dan pendekatan ilmiah dalam menangani masalah keamanan. Oleh karena itu, CEPOL membentuk kelompok kerja untuk mengkaji kemungkinan pengembangan *police science* sebagai bidang keilmuan yang dapat menjadi dasar bagi pendidikan, pelatihan, dan penelitian kepolisian di tingkat Eropa.²⁵

Salah satu temuan penting dari kajian CEPOL adalah bahwa ilmu kepolisian tidak dapat didefinisikan secara sempit sebagai studi tentang organisasi kepolisian, tetapi harus mencakup seluruh proses pemolisian (*policing*).²⁶ Pemolisian dipahami sebagai segala kegiatan yang bertujuan menjaga ketertiban dan keamanan, baik yang dilakukan oleh polisi maupun oleh lembaga lain dalam masyarakat. Dengan demikian, objek kajian ilmu kepolisian tidak

²³ Yobhel Levic de Fretes, Muhammad Krisna Bayunarendro, Hillary Cornelia, "Evidence-Based Policing as a Foundational Policing Model for the INP," Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 18, No. 2, (2024), 177-190.

²⁴ Colin Rogers, Ian Pepper, Louise Skilling, "Evidence-based policing for crime prevention in England and Wales: perception and use by new police recruits," Crime Prevention and Community Safety, Vol. 24, No.4, (2022), 328–341.
<https://doi.org/10.1057/s41300-022-00158-w>

²⁵ European Police College (CEPOL), "Perspectives of Police Science in Europe: Final Report," 3-5

²⁶ European Police College (CEPOL), "Perspectives of Police Science in Europe: Final Report," 23.

hanya terbatas pada institusi kepolisian, tetapi juga meliputi kebijakan keamanan, hubungan dengan masyarakat, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas.²⁷

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa ilmu kepolisian bersifat interdisipliner. CEPOL menegaskan bahwa pengembangan *police science* memerlukan kontribusi dari berbagai bidang ilmu, termasuk hukum, kriminologi, sosiologi, psikologi, ilmu politik, dan ilmu manajemen.²⁸ Tidak ada satu disiplin pun yang mampu menjelaskan secara lengkap fenomena kepolisian, sehingga diperlukan integrasi berbagai perspektif untuk memahami dan meningkatkan praktik pemolisian.

Selain bersifat interdisipliner, ilmu kepolisian juga dipahami sebagai ilmu terapan. Tujuan utama dari *police science* bukan hanya menghasilkan teori, tetapi juga memberikan dasar ilmiah bagi kebijakan dan praktik kepolisian. Oleh karena itu, hubungan antara penelitian, pendidikan, dan praktik operasional menjadi sangat penting. CEPOL menekankan bahwa pendidikan kepolisian harus didasarkan pada hasil penelitian, dan penelitian harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan praktis dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.²⁹

Dalam literatur internasional, pendekatan ini sejalan dengan perkembangan konsep *professional policing*, yaitu kepolisian yang bekerja berdasarkan standar keilmuan, etika profesi, dan prinsip akuntabilitas. Kepolisian modern tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan teknis semata, tetapi sebagai profesi yang memerlukan pendidikan tinggi, pelatihan khusus, dan kemampuan analisis yang kuat. Oleh karena itu, pengembangan ilmu kepolisian menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan profesionalisme dan legitimasi kepolisian dalam masyarakat demokratis.³⁰

Selain itu, literatur tentang *police science* juga menekankan pentingnya nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam negara hukum, kekuasaan kepolisian harus dibatasi oleh hukum dan diawasi oleh masyarakat. Oleh karena

²⁷ Sebastian Roché, "Police Science: Science of The Police or Science for The Police? — Conceptual Clarification and Taxonomy for Comparing Police Systems," (2017), 45

²⁸ European Police College (CEPOL), "Perspectives of Police Science in Europe: Final Report," 28.

²⁹ European Police College (CEPOL), 20-23

³⁰ European Police College (CEPOL), 10-20

itu, studi tentang kepolisian tidak hanya membahas efektivitas penegakan hukum, tetapi juga legitimasi penggunaan kekuasaan. CEPOL menegaskan bahwa pendekatan Eropa terhadap ilmu kepolisian harus didasarkan pada prinsip *rule of law*, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan perkembangan literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu kepolisian merupakan bidang kajian yang terus berkembang dan belum sepenuhnya memiliki batasan yang tetap. Namun demikian, terdapat beberapa karakter utama yang dapat diidentifikasi, yaitu bersifat interdisipliner, berorientasi pada praktik, berbasis penelitian, serta berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan negara hukum. Karakteristik tersebut menjadi dasar bagi pengembangan ilmu kepolisian dalam perspektif CEPOL, yang berupaya membangun pendekatan ilmiah terpadu terhadap kepolisian di tingkat Eropa.

Konsep Ilmu Kepolisian dalam Perspektif CEPOL

Upaya merumuskan konsep ilmu kepolisian secara sistematis di tingkat Eropa memperoleh momentum penting melalui inisiatif European Police College (CEPOL). Lembaga ini dibentuk oleh Dewan Uni Eropa dengan tujuan meningkatkan kerja sama pendidikan dan pelatihan bagi pejabat kepolisian negara-negara anggota, serta mengembangkan pendekatan bersama dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks dan bersifat lintas negara. Dalam menjalankan mandat tersebut, CEPOL menyadari bahwa kerja sama operasional tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya kesamaan pemahaman konseptual mengenai fungsi kepolisian, standar profesional, dan dasar ilmiah pemolisian. Oleh karena itu, pengembangan *police science* dipandang sebagai kebutuhan strategis dalam mendukung profesionalisme kepolisian di tingkat Eropa.³¹

Salah satu persoalan utama yang diidentifikasi dalam kajian CEPOL adalah tidak adanya definisi tunggal tentang ilmu kepolisian yang dapat diterima secara umum. Bahkan, di Eropa sendiri masih menjadi perdebatan penggunaan

³¹ European Police College (CEPOL), "Perspectives of Police Science in Europe: Final Report," 3-5.

istilah “Police Sciences” atau “Police Studies”.³² Berbagai penelitian tentang kepolisian telah dilakukan oleh para ahli dari disiplin yang berbeda, tetapi hasil penelitian tersebut belum terintegrasi dalam suatu kerangka konseptual yang dapat digunakan secara bersama. Selain itu, perbedaan tradisi hukum, sistem pemerintahan, dan struktur kepolisian di negara-negara Eropa menyebabkan sulitnya membangun pemahaman yang seragam mengenai apa yang dimaksud dengan *police science*. Kondisi ini mendorong CEPOL untuk membentuk kelompok kerja yang bertugas melakukan klarifikasi konseptual terhadap ilmu kepolisian.³³

Kelompok kerja tersebut terdiri dari akademisi dan praktisi kepolisian dari berbagai negara anggota dengan latar belakang keilmuan yang beragam, seperti hukum, kriminologi, sosiologi, psikologi, dan ilmu manajemen. Tujuan utama kelompok ini adalah merumuskan dasar-dasar konseptual ilmu kepolisian, termasuk definisi, ruang lingkup, metode, dan tujuan pengembangannya.³⁴ Dalam proses kajian tersebut disepakati bahwa ilmu kepolisian tidak dapat dipahami secara sempit sebagai studi tentang organisasi kepolisian, melainkan harus mencakup seluruh proses pemolisian (*policing*) dalam masyarakat. Dalam konteks ini, CEPOL mendefinisikan ilmu kepolisian sebagaimana berikut:³⁵

“Police Science is the scientific study of the police as an institution and of policing as a process. As an applied discipline it combines methods and subjects of other neighbouring disciplines within the field of policing. It includes all of what the police do and all aspects from outside that have an impact on policing and public order...”

³² European Police College (CEPOL), “Perspectives of Police Science in Europe: Final Report,” 23

³³ European Police College (CEPOL), “Perspectives of Police Science in Europe: Final Report,” 14

³⁴ European Police College (CEPOL), “Perspectives of Police Science in Europe: Final Report,” 14

³⁵ European Police College (CEPOL), “Perspectives of Police Science in Europe: Final Report,” 23

Dalam perspektif CEPOL, istilah *policing* (pemolisian) memiliki pengertian yang lebih luas daripada *police*. Polisi dipahami sebagai institusi formal yang memiliki kewenangan negara untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban, sedangkan *policing* mencakup seluruh aktivitas yang bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban, baik yang dilakukan oleh polisi maupun oleh lembaga lain, termasuk lembaga pemerintah, organisasi swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, objek kajian ilmu kepolisian tidak hanya terbatas pada organisasi kepolisian, tetapi juga mencakup kebijakan keamanan, mekanisme pengawasan, hubungan dengan masyarakat, serta berbagai bentuk kerja sama dalam menjaga ketertiban sosial.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa ilmu kepolisian dalam perspektif CEPOL bersifat interdisipliner. Tidak ada satu disiplin ilmu pun yang mampu menjelaskan secara lengkap fenomena kepolisian, sehingga diperlukan integrasi berbagai perspektif. Ilmu hukum diperlukan untuk memahami dasar kewenangan dan batasan penggunaan kekuasaan, kriminologi untuk menjelaskan kejahatan dan pencegahannya, sosiologi untuk menganalisis hubungan antara polisi dan masyarakat, psikologi untuk memahami perilaku individu dalam organisasi, serta ilmu manajemen dan administrasi publik untuk meningkatkan efektivitas organisasi kepolisian. Integrasi berbagai disiplin tersebut menjadi ciri utama *police science* sebagai bidang kajian yang berorientasi pada pemecahan masalah.³⁶

Selain bersifat interdisipliner, CEPOL menegaskan bahwa ilmu kepolisian merupakan ilmu terapan (*applied science*), sebagaimana dituliskan dalam dokumen final CEPOL, sebagaimana berikut:³⁷

“As an applied discipline it combines methods and subjects of other neighbouring disciplines within the field of policing...”

³⁶ Hans-Gerd Jaschke and Klaus Neidhardt, “A Modern Police Science as an Integrated Academic Discipline: A Contribution to the Debate on its Fundamentals,” *Policing and Society*, Volume. 17, No. 4, (2007), 303-320

³⁷ European Police College (CEPOL), “Perspectives of Police Science in Europe: Final Report,” 23

Tujuan utama dari *police science* bukan hanya menghasilkan teori, tetapi juga memberikan dasar ilmiah bagi praktik kepolisian. Oleh karena itu, hubungan antara penelitian, pendidikan, dan praktik operasional menjadi sangat penting. Penelitian harus menghasilkan pengetahuan yang relevan bagi kebutuhan kepolisian, pendidikan harus mentransfer pengetahuan tersebut kepada anggota polisi, dan praktik operasional harus menggunakan pengetahuan tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Keterkaitan antara ketiga unsur tersebut dipandang sebagai syarat utama bagi pengembangan kepolisian modern yang profesional.³⁸

Dalam laporan CEPOL juga ditegaskan bahwa pengembangan ilmu kepolisian tidak dapat dipisahkan dari konteks masyarakat demokratis.³⁹ Kepolisian merupakan institusi yang memiliki kewenangan menggunakan kekuatan, sehingga penggunaannya harus dibatasi oleh hukum dan diawasi secara ketat. Oleh karena itu, ilmu kepolisian harus memberikan perhatian tidak hanya pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga pada legitimasi penggunaan kekuasaan. Hal ini tercermin dari program pelatihan yang diselenggarakan oleh CEPOL yang secara khusus memuat materi mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia (*fundamental rights*), *rule of law*, dan akuntabilitas publik menjadi landasan normatif yang harus menjadi bagian dari kajian *police science*.⁴⁰ Hal ini juga dinyatakan dalam laporan final CEPOL sebagaimana berikut:

“CEPOL shall contribute by means of police training and by insights of police science and research to the European integration process which is firmly rooted in a shared commitment to freedom based on human rights, democratic institutions and the rule of law...”

³⁸ European Police College (CEPOL), 140

³⁹ Hans-Gerd Jaschke menyatakan “It also offers the knowledge for democratic societies that are needed to monitor police practice and to take part in the process of policing.” in “Police Science – A European Approach,” https://www.cepol.europa.eu/api/assets/website/Research_Science/sps_aea.pdf

⁴⁰ Lihat Annual Report CEPOL 2024, “2024 In Brief: stay ahead of crime,” European Union Agency for Law Enforcement Training.

Pendekatan ini mencerminkan perbedaan antara konsep kepolisian dalam negara demokratis dengan konsep kepolisian dalam sistem otoriter. Dalam negara demokratis, kepolisian tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, tetapi juga harus melindungi hak warga negara dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan kepolisian di Eropa menekankan pentingnya nilai-nilai demokrasi, etika profesi, dan kemampuan analisis kritis. CEPOL menilai bahwa pengembangan ilmu kepolisian merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa kepolisian bekerja berdasarkan pengetahuan dan prinsip hukum, bukan semata-mata berdasarkan kekuasaan.

Konsep *police science* dalam perspektif CEPOL juga berkaitan erat dengan kebutuhan kerja sama internasional. Globalisasi dan integrasi Eropa menyebabkan meningkatnya kejahatan lintas negara, seperti terorisme, perdagangan manusia, kejahatan siber, dan kejahatan terorganisasi.⁴¹ Tantangan tersebut tidak dapat dihadapi oleh satu negara secara sendiri-sendiri, sehingga diperlukan kerja sama yang erat antara kepolisian negara-negara anggota. Kerja sama tersebut membutuhkan kesamaan standar profesional, kesamaan metode, dan kesamaan pemahaman tentang fungsi kepolisian. Oleh karena itu, pengembangan ilmu kepolisian dipandang sebagai sarana untuk membangun bahasa bersama dalam bidang keamanan.⁴²

Dalam konteks ini, CEPOL menekankan bahwa pendidikan dan pelatihan kepolisian harus didasarkan pada penelitian ilmiah. Polisi modern harus mampu memahami perkembangan masyarakat, teknologi, dan bentuk kejahatan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pendidikan kepolisian tidak cukup hanya bersifat teknis, tetapi harus mencakup pengetahuan teoretis yang memungkinkan anggota polisi berpikir secara analitis dan kritis. Ilmu kepolisian

⁴¹ European Union Agency for Law Enforcement Training, *European Strategic training needs assessment 2018-2021*, (EU law enforcement priorities. Budapest: CEPOL, 2018).

⁴² Hal ini tercermin dalam Mandat CEPOL di bidang penelitian dan ilmu pengetahuan diatur dalam Pasal 5 Keputusan Dewan (Council Decision) tanggal 20 September 2005, yang menyatakan, "The aim of CEPOL shall be to help train the senior police officers of the Member States by optimising cooperation between CEPOL's various components. It shall support and develop a European approach to the main problems facing Member States in the fight against crime, crime prevention, and the maintenance of law and order and public security, in particular the cross-border dimensions of those problems, "in European Police College (CEPOL), "Perspectives of Police Science in Europe: Final Report," 6

berfungsi sebagai dasar akademik yang mendukung pengembangan kurikulum pendidikan kepolisian di Eropa.

Pendekatan CEPOL terhadap ilmu kepolisian juga menunjukkan bahwa batas antara akademisi dan praktisi semakin tidak tegas. Penelitian tentang kepolisian tidak hanya dilakukan oleh universitas, tetapi juga oleh lembaga pendidikan kepolisian dan institusi kepolisian itu sendiri. Sebaliknya, praktik kepolisian menjadi sumber penting bagi penelitian ilmiah. Hubungan timbal balik antara teori dan praktik ini dipandang sebagai ciri utama *police science* sebagai ilmu terapan yang berkembang dalam lingkungan profesional.⁴³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep ilmu kepolisian dalam perspektif CEPOL memiliki beberapa karakter utama, yaitu bersifat interdisipliner, berorientasi pada praktik, berbasis penelitian, dan berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan negara hukum. Ilmu kepolisian dipahami sebagai bidang kajian yang mempelajari kepolisian sebagai institusi dan pemolisian sebagai proses sosial, dengan tujuan meningkatkan profesionalisme, efektivitas, dan legitimasi kepolisian dalam masyarakat modern. Pendekatan ini menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan, penelitian, dan kerja sama kepolisian di tingkat Eropa, serta memberikan kerangka konseptual yang penting bagi pengembangan ilmu kepolisian di berbagai negara.

Karakter Interdisipliner Ilmu Kepolisian

Salah satu karakter utama ilmu kepolisian (*police science*) dalam literatur modern adalah sifatnya yang interdisipliner.⁴⁴ Berbeda dengan disiplin ilmu yang memiliki objek kajian yang jelas dan metode yang relatif baku, ilmu kepolisian berkembang dari kebutuhan praktis untuk memahami dan meningkatkan fungsi kepolisian dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada tugas kepolisian yang mencakup aspek hukum, sosial, politik, dan organisasi, maka kajian tentang kepolisian tidak dapat dibatasi pada satu bidang ilmu saja. Dalam perspektif

⁴³ European Police College (CEPOL), "Perspectives of Police Science in Europe: Final Report," 24.

⁴⁴ Hans-Gerd Jaschke and Klaus Neidhardt, "A Modern Police Science as an Integrated Academic Discipline: A Contribution to the Debate on its Fundamentals," *Policing and Society*, Volume. 17, No. 4, (2007), 303-320

European Police College (CEPOL), sifat interdisipliner ini merupakan ciri mendasar yang membedakan *police science* dari disiplin akademik lain.⁴⁵

Dalam laporan CEPOL ditegaskan bahwa kepolisian sebagai institusi berada pada titik pertemuan antara negara dan masyarakat. Polisi memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuasaan negara, tetapi pada saat yang sama harus bekerja di tengah masyarakat yang memiliki nilai, norma, dan kepentingan yang beragam. Oleh karena itu, untuk memahami fungsi kepolisian secara utuh diperlukan pendekatan yang menggabungkan perspektif hukum, kriminologi, sosiologi, psikologi, ilmu politik, dan ilmu organisasi. Tidak ada satu disiplin pun yang mampu menjelaskan seluruh dimensi pemolisian, sehingga integrasi berbagai bidang ilmu menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Dari perspektif hukum, kepolisian dipahami sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum. Kajian hukum memfokuskan pada dasar kewenangan kepolisian, batas penggunaan kekuatan, prosedur penegakan hukum, serta mekanisme pengawasan terhadap tindakan polisi. Dalam negara hukum, seluruh tindakan kepolisian harus memiliki dasar legal yang jelas, sehingga ilmu hukum menjadi salah satu fondasi utama dalam pengembangan ilmu kepolisian. Namun demikian, pendekatan hukum saja tidak cukup untuk memahami bagaimana kepolisian bekerja dalam praktik, karena banyak keputusan operasional yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan organisasi.

Kriminologi memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara kepolisian dan kejahatan. Ilmu ini mempelajari sebab-sebab kejahatan, pola kriminalitas, serta berbagai strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Dalam konteks *police science*, kriminologi membantu memahami bagaimana kebijakan kepolisian mempengaruhi tingkat kejahatan, serta bagaimana metode pemolisian dapat dirancang secara lebih efektif. Pendekatan berbasis penelitian dalam kriminologi juga menjadi dasar bagi

⁴⁵ “A police science which follows an interdisciplinary and European approach will form a strong link between theory and practice, doctrine/teachings/ training and research,” in European Police College (CEPOL), “Perspectives of Police Science in Europe: Final Report,” 12

berkembangnya konsep *evidence-based policing*, yaitu pemolisian yang didasarkan pada data dan penelitian empiris.⁴⁶

Sosiologi memberikan perspektif yang berbeda dengan menempatkan kepolisian sebagai institusi sosial yang berinteraksi dengan masyarakat. Dalam pendekatan sosiologis, perhatian tidak hanya pada kewenangan polisi, tetapi juga pada bagaimana masyarakat memandang polisi, bagaimana legitimasi dibangun, dan bagaimana konflik antara kepolisian dan masyarakat dapat terjadi. Studi sosiologi kepolisian menunjukkan bahwa efektivitas pemolisian tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, hubungan antara polisi dan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam kajian ilmu kepolisian modern.⁴⁷

Selain hukum, kriminologi, dan sosiologi, psikologi juga memiliki peran penting dalam ilmu kepolisian. Kepolisian merupakan organisasi yang bekerja dalam situasi yang sering kali penuh tekanan, sehingga pemahaman tentang perilaku individu dan kelompok menjadi sangat penting. Psikologi membantu menjelaskan bagaimana anggota polisi mengambil keputusan dalam situasi darurat, bagaimana stres mempengaruhi kinerja, serta bagaimana kepemimpinan dalam organisasi kepolisian dapat meningkatkan efektivitas kerja. Dalam perspektif CEPOL, aspek psikologis tidak hanya berkaitan dengan individu polisi, tetapi juga dengan interaksi antara polisi dan masyarakat.⁴⁸

Ilmu organisasi dan manajemen juga merupakan bagian penting dari ilmu kepolisian. Kepolisian adalah organisasi besar yang memiliki struktur hierarkis, sistem komando, dan prosedur operasional yang kompleks. Oleh karena itu, studi tentang organisasi, kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen perubahan menjadi sangat relevan. Banyak reformasi kepolisian di berbagai negara menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya pada aturan hukum, tetapi pada bagaimana organisasi dijalankan. Ilmu manajemen

⁴⁶ Jack R. Greene, "The Upside and Downside of the 'Police Science' Epistemic Community," 380

⁴⁷ Jack R. Greene, "The Upside and Downside of the 'Police Science' Epistemic Community," 381

⁴⁸ Jack R. Greene, "The Upside and Downside of the 'Police Science' Epistemic Community," 381-382

membantu menjelaskan bagaimana kebijakan dapat diterapkan secara efektif dalam struktur organisasi kepolisian.

Selain itu, ilmu politik memberikan kerangka untuk memahami hubungan antara kepolisian dan negara. Kepolisian merupakan bagian dari sistem pemerintahan, sehingga kebijakan kepolisian sering dipengaruhi oleh keputusan politik. Studi ilmu politik membantu menjelaskan bagaimana kekuasaan digunakan, bagaimana kebijakan keamanan dirumuskan, serta bagaimana kepolisian diawasi dalam sistem demokratis. Dalam negara demokratis, kepolisian harus bertanggung jawab kepada pemerintah yang dipilih secara sah, tetapi pada saat yang sama harus tetap netral secara politik. Ketegangan antara independensi profesional dan kontrol politik menjadi salah satu tema penting dalam kajian ilmu kepolisian.⁴⁹

Sifat interdisipliner ilmu kepolisian juga terlihat dalam perkembangan konsep professional policing. Kepolisian modern tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan teknis semata, tetapi sebagai profesi yang memerlukan pendidikan tinggi dan kemampuan analisis. Greene menyatakan bahwa profesionalisme kepolisian berkaitan dengan meningkatnya peran penelitian, pendidikan, dan standar etika dalam praktik kepolisian. Polisi modern diharapkan tidak hanya mampu menjalankan perintah, tetapi juga mampu memahami alasan di balik kebijakan yang diterapkan.⁵⁰

Dalam perspektif CEPOL, sifat interdisipliner ilmu kepolisian memiliki implikasi langsung terhadap pendidikan kepolisian. Kurikulum pendidikan tidak boleh hanya berisi pelatihan teknis, tetapi harus mencakup berbagai bidang ilmu yang relevan dengan tugas kepolisian. Pendidikan kepolisian di Eropa dirancang untuk menggabungkan teori dan praktik, sehingga anggota polisi memiliki kemampuan analitis sekaligus keterampilan operasional. Pendekatan ini

⁴⁹ European Police College (CEPOL), "Perspectives of Police Science in Europe: Final Report," 159-161

⁵⁰ Jack R. Greene, "The Upside and Downside of the 'Police Science' Epistemic Community," 386

dipandang sebagai syarat penting untuk menghadapi tantangan keamanan modern yang semakin kompleks.⁵¹

Karakter interdisipliner juga menunjukkan bahwa ilmu kepolisian bersifat dinamis dan terus berkembang. Perubahan dalam masyarakat, teknologi, dan bentuk kejahatan menyebabkan kebutuhan akan pengetahuan baru dalam bidang kepolisian. Oleh karena itu, *police science* tidak dapat bersifat statis, tetapi harus selalu terbuka terhadap perkembangan ilmu lain. Integrasi berbagai disiplin memungkinkan ilmu kepolisian untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan keamanan, sekaligus meningkatkan kualitas kebijakan dan praktik pemolisian.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sifat interdisipliner merupakan karakter utama ilmu kepolisian dalam perspektif modern maupun dalam pendekatan CEPOL. Ilmu kepolisian tidak dapat dipahami sebagai cabang dari satu disiplin tertentu, melainkan sebagai bidang kajian yang mengintegrasikan berbagai ilmu untuk memahami dan meningkatkan fungsi kepolisian dalam masyarakat. Pendekatan interdisipliner ini menjadi dasar bagi pengembangan *police science* sebagai disiplin terapan yang bertujuan meningkatkan profesionalisme, efektivitas, dan legitimasi kepolisian dalam negara demokratis.

PENUTUP

Ilmu kepolisian (*police science*) merupakan bidang kajian yang berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas tugas kepolisian dalam masyarakat modern. Perubahan lingkungan keamanan, meningkatnya tuntutan profesionalisme, serta kebutuhan akan akuntabilitas dalam negara demokratis mendorong perlunya pendekatan ilmiah yang mampu menjelaskan dan meningkatkan praktik pemolisian secara sistematis. Dalam perkembangan literatur akademik, ilmu kepolisian tidak muncul sebagai disiplin tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bidang interdisipliner yang mengintegrasikan berbagai ilmu, seperti hukum, kriminologi, sosiologi, psikologi, ilmu organisasi, dan ilmu politik. Karakter interdisipliner tersebut mencerminkan bahwa kepolisian merupakan institusi yang berada pada pertemuan antara negara,

⁵¹ European Police College (CEPOL), "Perspectives of Police Science in Europe: Final Report," 16

hukum, dan masyarakat, sehingga tidak dapat dipahami hanya dari satu perspektif keilmuan.

Dalam konteks Eropa, upaya merumuskan ilmu kepolisian secara lebih sistematis memperoleh momentum melalui inisiatif European Police College (CEPOL). Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pelatihan kepolisian, tetapi juga sebagai forum pengembangan pendekatan ilmiah terhadap kepolisian. Melalui laporan *Perspectives of Police Science in Europe* dan dokumen konseptual lainnya, CEPOL berupaya membangun pemahaman bersama mengenai definisi, ruang lingkup, dan tujuan ilmu kepolisian sebagai dasar bagi kerja sama keamanan di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Kajian tersebut menunjukkan bahwa ilmu kepolisian harus dipahami tidak hanya sebagai studi tentang institusi kepolisian, tetapi juga sebagai kajian tentang proses pemolisian (*policing*) dalam arti luas, termasuk kebijakan keamanan, hubungan dengan masyarakat, dan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan.

Salah satu temuan utama dalam perspektif CEPOL adalah bahwa ilmu kepolisian merupakan ilmu terapan yang berorientasi pada praktik. Tujuan utama pengembangan *police science* bukan semata-mata menghasilkan teori, tetapi memberikan dasar ilmiah bagi pengambilan kebijakan, pendidikan, dan pelaksanaan tugas kepolisian. Oleh karena itu, hubungan antara penelitian, pendidikan, dan praktik operasional menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan. Penelitian menghasilkan pengetahuan, pendidikan mentransfer pengetahuan tersebut kepada anggota kepolisian, dan praktik operasional menggunakan pengetahuan tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Integrasi ketiga unsur ini dipandang sebagai syarat utama bagi terwujudnya kepolisian modern yang profesional.

Selain bersifat interdisipliner dan terapan, konsep ilmu kepolisian dalam perspektif CEPOL juga berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan *rule of law*. Kepolisian merupakan institusi yang memiliki kewenangan menggunakan kekuatan negara, sehingga penggunaannya harus dibatasi oleh hukum dan diawasi secara efektif. Oleh karena itu, kajian ilmu kepolisian tidak hanya membahas efektivitas penegakan hukum, tetapi juga legitimasi penggunaan kekuasaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta akuntabilitas kepada

masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa kepolisian dalam negara demokratis tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, tetapi juga melindungi hak warga negara dan menjaga kepercayaan publik.

Sifat interdisipliner ilmu kepolisian juga memiliki implikasi penting terhadap pendidikan dan pengembangan profesionalisme kepolisian. Kepolisian modern memerlukan anggota yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan analitis dan pemahaman teoritis tentang masyarakat, hukum, dan organisasi. Oleh karena itu, pendidikan kepolisian harus dirancang sebagai pendidikan akademik yang berbasis penelitian, bukan sekadar pelatihan teknis. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *knowledge-based policing*, yaitu pemolisian yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan bukti empiris.

Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ilmu kepolisian dalam perspektif CEPOL memiliki beberapa karakter utama, yaitu bersifat interdisipliner, berorientasi pada praktik, berbasis penelitian, dan berlandaskan nilai demokrasi serta negara hukum. Ilmu kepolisian dipahami sebagai bidang kajian yang mempelajari kepolisian sebagai institusi dan pemolisian sebagai proses sosial, dengan tujuan meningkatkan profesionalisme, efektivitas, dan legitimasi kepolisian dalam menghadapi tantangan keamanan modern. Pendekatan ini memberikan kerangka konseptual yang penting bagi pengembangan ilmu kepolisian di berbagai negara, khususnya dalam upaya memperkuat dasar akademik bagi praktik kepolisian yang profesional, akuntabel, dan demokratis.

Dengan demikian, pengembangan ilmu kepolisian tidak hanya merupakan kebutuhan akademik, tetapi juga kebutuhan praktis dalam membangun institusi kepolisian yang mampu menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks. Perspektif CEPOL menunjukkan bahwa kepolisian modern harus didasarkan pada pengetahuan, penelitian, dan nilai-nilai demokrasi, sehingga fungsi kepolisian dapat dijalankan secara efektif sekaligus tetap berada dalam kerangka hukum dan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bayley, David H. *Police for the Future*. Oxford: Oxford University Press, 1994.

- Bittner, Egon. *The Functions of the Police in Modern Society*. Rockville, MD: National Institute of Mental Health, 1970.
- Campesi, Giuseppe. *A Genealogy of Public Security: The Theory and History of Modern Police Powers*. New York: Routledge, 2016: p23-24; p45-48
- de Fretes, Yobhel Levic, Muhammad Krisna Bayunarendro, and Hillary Cornelia. "Evidence-Based Policing as a Foundational Policing Model for the INP." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 18, no. 2 (2024): 177-190
- European Police College (CEPOL). *Perspectives of Police Science in Europe: Final Report*. Budapest: CEPOL, 2007.
https://www.cepoleuropa.eu/api/assets/website/Research_Science/PGEAPS_Final_Report.pdf
- European Union Agency for Law Enforcement Training. *CEPOL Conference Proceedings*. Monica den Boer, János Fehérváry, Hans-Gerd Jaschke, dan Detlef Nogala (Editor). Budapest: European Union Agency for Law Enforcement Training, 2017. <https://doi.org/10.2825/13491>.
- European Union Agency for Law Enforcement Training. *European Strategic Training Needs Assessment 2018–2021: EU Law Enforcement Priorities*. Budapest: CEPOL, 2018.
https://www.cepoleuropa.eu/api/assets//CEPOL_EU_STNA_REPORT.
- European Union Agency for Law Enforcement Training. *Annual Report CEPOL 2024: "2024 in Brief: Stay Ahead of Crime."* Budapest: CEPOL, 2024.
- Feltes, Thomas. "Polizeiwissenschaft in Deutschland." *Polizei & Wissenschaft*, no. 4 (2007): H.4; S.2-21
- Foucault, Michel. *Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France, 1977–1978*. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
<https://mirror.explodie.org/Foucault-Security-Territory-Population.pdf>
- Greene, Jack R. "The Upside and Downside of the 'Police Science' Epistemic Community." *Policing: A Journal of Policy and Practice* 8, no. 4 (2014): 379–392. <https://doi.org/10.1093/police/pau034>.

- Jaschke, Hans-Gerd, and Klaus Neidhardt. "A Modern Police Science as an Integrated Academic Discipline: A Contribution to the Debate on Its Fundamentals." *Policing and Society* 17, no. 4 (2007): 303-320
- Manning, Peter K. "The Study of Policing." *Police Quarterly* 8 (2005): 23–43. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:143917875>.
- Reiner, Robert. *The Politics of the Police*. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2010: 2-5
- Roché, Sebastian. "Police Science: Science of the Police or Science for the Police?—Conceptual Clarification and Taxonomy for Comparing Police Systems." Working paper, 2017: 45; <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:261463093>
- Rogers, Colin, Ian Pepper, and Louise Skilling. "Evidence-Based Policing for Crime Prevention in England and Wales: Perception and Use by New Police Recruits." *Crime Prevention and Community Safety* 24, no. 4 (2022): 328–341. <https://doi.org/10.1057/s41300-022-00158-w>.
- Sulistyo, Hermawan, and Tito Karnavian. *Democratic Policing*. Jakarta: Pensil 324, 2018.

